

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Saat ini badan usaha milik desa atau yang biasa kita sebut dengan BUMDes sedang berkembang cukup pesat, perkembangan ini karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar desa-desa membentuk BUMDes sebagai sarana memperoleh pendapatan bagi desa yang bersangkutan (Amanda, 2015). Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dalam pasal 213 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi kebutuhan desa, tercatat hingga tahun 2018 sebanyak 45.549 BUMDes sudah tersebar di 74.957 desa di Indonesia, BUMDes dibentuk dengan memilih unit usaha yang sesuai untuk dikelola oleh desa (Kemendes PDTT). Unit-unit usaha yang dikelola antara lain adalah dalam bidang pengelolaan jasa objek wisata alam, pengelolaan kopi, gula aren, gula semut, produk ikan, pembuatan batik, dan lain-lain (Sani dan Ramuna, 2013).

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh para perangkat desa. Pembangunan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bangsa dan Negara guna mencapai tujuan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. BUMDes memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan sehingga memberikan pengaruh cukup besar untuk stabilitas nasional. Disatu sisi desa juga dinilai strategis untuk

pembangunan ekonomi Negara karena desa menjadi inti dasar dalam permasalahan masyarakat sampai dengan perencanaan dan realisasi tujuan Negara yang berada pada tingkat desa.

Pembangunan BUMDes merupakan cara untuk memenuhi undang-undang tentang kewenangan pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) dan untuk memberikan inovasi terhadap pengembangan desa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan bagi masyarakat desa. Pelaksanaan dan kepemilikan BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes juga merupakan solusi pembentukan ekonomi desa mandiri guna meningkatkan pendapatan asli daerah (Amanda, 2015).

Perkembangan BUMDes perlu dilakukan guna untuk memastikan fungsi BUMDes sesuai dengan perannya. BUMDes dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan asal pengelolaan BUMDes dilakukan secara professional dan terarah. BUMDes juga diharapkan dapat memberikan dorongan potensi perkonomian di desa. Pembentukan BUMDes dapat membantu pemerintah desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa (Agunggunanto, Arianti & Kushartono, 2016)

Sebanyak 45,549 BUMDes yang tersebar di Indonesia belum semua BUMDes di kelola dengan baik dan terarah sehingga ada tumpang tindih antara BUMDes satu dengan BUMDes lainnya sehingga sering kali banyak BUMDes yang sudah berdiri bertahun-tahun tapi mengalami kegagalan dalam

pengelolaannya, tetapi ada juga BUMDes yang mengalami peningkatan dalam pengelolaannya sehingga menjadi BUMDes yang sukses (Pertana, 2018). Fenomena kegagalan BUMDes masih menjadi perhatian kalangan pemerintah desa untuk mengetahui penyebab kegagalan dan mencari cara untuk memperbaiki hingga mengalami peningkatan dan mencapai target.

Seperti kasus BUMDes di desa Air Lago kecamatan Muara Siau, Jambi. Badan usaha yang dikelola oleh desa mengalami kerugian sebesar 50jt, uang tersebut hilang dikarenakan tidak adanya transparansi terhadap masyarakat (RedaksiJambiPos.id, 2019). Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan serta pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, padahal jika ada pengawasan serta arahan yang baik akan meningkatkan perekonomian desa.

Guna peningkatan perekonomian di desa, kabupaten temanggung tepatnya di desa Tening melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Peresmian BUMDes ini dalam rangka kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat dari Tim Desiminasi Teknologi Fakultas Teknik UMM untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tening khususnya dalam bidang pengolahan hasil kopi. UMM memberikan bantuan berupa 3 alat pengolah kopi dari pengupasan sampai pada penggilingan atau coffee grinder (Aji, 2018).

BUMDes sukses pemerintah desa juga harus memperhatikan cara untuk mempertahankan kesuksesannya. BUMDes menjadi salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi desa yang kuat.

Penguatan ekonomi daerah sangat penting untuk perekonomian nasional. Perekonomian desa yang kuat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi. BUMDes menjadi salah satu penguatan ekonomi desa yang sejalan dengan teori *social enterprise* yang menjelaskan bahwa bahwa organisasi merupakan lembaga sosial yang dijalankan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak (Nasruddin & Misaridin, 2014). *Social enterprise* ditandai dengan dinamika organisasi dan fungsional dalam bentuk hukum dari organisasi nirlaba sampai perusahaan barang maupun jasa publik dan harus ada dukungan pemerintah dalam mengembangkan program usaha sosial di tingkat pemerintah menunjukkan bahwa subsidi pemerintah merupakan instrumen penting dalam kelahiran dan pertumbuhan perusahaan sosial serta kinerja sosial dan ekonomi dari perusahaan sosial tetapi harus dilengkapi dengan sumbangan perusahaan dan umum untuk mempertahankan kinerja sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (Adrews et al., 2013)

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat memotivasi desa agar lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun perlu dilihat posisi keberandaan BUMDes ini dalam menghadapi realita arus intervensi modal domestik dan asing, jika dilihat modal yang dimiliki BUMDes tidak seberapa banyak jika dibandingkan dengan modal usaha swasta yang besar (Sani dan Ramuna, 2013). BUMDes dan UKM membawa ketinggian berikutnya dan model pelaporan keberlanjutan membuat bisnis interval lebih transparan dalam penyampaian informasi keuangan maupun non keuangan (Kurniawan,

2018). Sumber daya yang dimiliki oleh desa ini rentang terhadap intervensi modal dan pasar dalam pedesaan. Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat menangkis potensi korporasi asing nasional sehingga keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian desa serta menjadi perusahaan desa (Ramadana, 2013). Untuk mengingat bahwa BUMDes penting dalam pembangunan dan pengembangan desa maka diterapkan bahwa desa memperoleh dana bantuan dari pemerintah daerah sebagai modal BUMDes untuk pembangunan dan pengembangan perekonomian desa.

Keterbukaan dalam pemberian informasi dan pengambilan keputusan merupakan kebijakan dan tindakan yang baik yang diambil oleh pemerintah desa. Transparansi dalam bidang keuangan itu berarti adanya keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan serta penyajian pengelolaan keuangan. Keterbukaan dalam bidang manajemen sendiri itu berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu program atau kegiatan desa (Soebianto dan Mardikanto, 2012).

Keberandaan BUMDes juga perlu menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangannya yaitu akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes. BUMDes dapat membantu meningkatkan perekonomian desa serta memperbaiki pendapatan asli desa (PAD). Pemerintah desa harus dapat membuktikan atau tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan BUMDes dengan cara menaati serta mengikuti peraturan yang sudah diterapkan dalam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penerapan akuntabilitas di BUMDes telah menarik banyak minat pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) serta kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk usaha BUMDes pada sektor perdagangan, perkebunan (kelapa sawit) serta bidang jasa di Desa telah memberikan peningkatan pendapatan (Rahman, 2015). Dalam menjalankan fungsi pemerintah penting adanya transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas dalam berbagai hal supaya segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan seperti dalam QS. Al Baqarah (2) Ayat 283 berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah dipercayai itu menunaikan amnanya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Solekhan (2014) Memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan program alternative dalam

pertumbuhan ekonomi juga perlu adanya konsep pengelolaan yang baik sebagai berikut :

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa.
2. Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa sesuai dengan ,;/peraturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa ikut aktif dalam berpartisipasi dalam perencanaan, ,pelaksanakan kegiatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang berguna bagi masyarakat desa secara berkelanjutan atau dalam jangka panjang.

Dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai mendirikan BUMDes. Di Kabupaten Temanggung sudah mendirikan sebanyak 183 BUMDes yang tersebar di 266 desa. Berikut adalah tabel daftar jumlah BUMDes di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Bumdes Di Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BUMDes
1	Bansari	13	9 BUMDes
2	Bejen	14	9 BUMDes
3	Bulu	19	11 BUMDes
4	Candiroto	14	8 BUMDes
5	Gemawang	10	8 BUMDes
6	Jumo	13	13 BUMDes
7	Kaloran	14	7 BUMDes
8	Kandangan	16	7 BUMDes
9	Kedu	14	8 BUMDes
10	Kledung	13	9 BUMDes
11	Kranggan	12	9 BUMDes
12	Ngadirejo	19	9 BUMDes
13	Parakan	14	14 BUMDes
14	Pringsurat	14	11 BUMDes

15	Selopampang	12	10 BUMDes
16	Temanggung	6	6 BUMDes
17	Tembarak	13	12 BUMDes
18	Tlogomulyo	12	tu9 BUMDes
19	Tretep	11	8 BUMDes
20	Wonoboyo	13	6 BUMDes
	TOTAL	266	183 BUMDes

Penelitian yang dilakukan Anggraeni (2016) menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes didalam desa membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pergerakan pola sosial dan pergerakan interaksi diantara warga akan terjadi. BUMDes memberikan manfaat bagi pendapatan asli desa, tetapi pendapatan ini tidak dapat langsung dirasakan oleh warga atau masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam penelitian yang dilakukan Prasetyo (2017) mendapatkan hasil program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes di berbagai daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala

telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. BUMDes Desa Pejambon merupakan salah satu bukti BUMDes yang masih eksis ditengah-tengah pembangunan desa tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan (Mahpudin, Dadan & Dudang, 2018) memperoleh hasil pertama BUMDes mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, kedua partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu program baik yang dirancang oleh desa ataupun pusat. Berdasarkan paparan diatas mengenai belum adanya tata kelola serta pengawasan yang baik sehingga menyebabkan tumpang tindih keberhasilan BUMDes satu dengan yang lain dan menyebabkan kegagalan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, maka peneliti ingin menguji pengaruh BUMDes yang berada di kabupaten Temanggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) peneliti ingin menguji pengaruh badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan perekonomian desa di kabupaten temanggung.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni, M. R. R. S. (2016) 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta'. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berada dalam objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sedangkan penelitian ini

dilakukan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian terdahulu lebih mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa sedangkan penelitian ini lebih mengacu pada penguatan ekonomi desa atau peningkatan dalam pendapatan asli desa dan peningkatan kesejahteraan desa. Secara teori penelitian terdahulu menggunakan teori *Resource Based View* yaitu pada ketersediaan sumber daya desa sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Social Enterprise* yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada faktor-faktor pengambat dan pendukung BUMDes?
2. Bagaimana peran BUMDes dalam penguatan ekonomi Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran pemerintah dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes berpengaruh terhadap penguatan ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa dalam penguatan ekonomi desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang teori dan konsep yang diperoleh dalam penerapannya secara nyata.

- b. Memberikan manfaat yang lebih tentang ilmu akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap penguatan ekonomi.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti untuk menambah ilmu tentang akuntansi sektor publik terkait dengan pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap penguatan ekonomi.
- b. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dalam pengelolaan BUMDes sehingga bisa terus maju serta dapat menguatkan ekonomi desa.

